



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 jo. Nomor 1-144/SK/KMA/I/2011, tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Informasi yang dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini antara lain memberi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Kisaran dan Wilayah Hukumnya, Informasi tentang data jumlah perkara, Laporan Keuangan, dan Laporan Kepegawaian serta berbagai pengembangan dan perubahan yang telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan pengolahan data, penyediaan informasi bagi masyarakat dan peningkatan SDM bagi para Hakim dan aparatur Pengadilan lainnya.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 kami berharap dapat memberikan informasi kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Atas segala kekurangan baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyelesaian laporan ini, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas di masa-masa yang akan datang.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	A. KEADAAN PERKARAN DI PERADILAN UMUM.....	6
	• Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	6
	• Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	6
	• Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	7
	• Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	7
	B. PENYELESAIAN PERKARA.....	7
	• Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	8
	• Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	8
	• Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk	8
	• Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi.....	9
	• Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi.....	9
	AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKAT ISO	
	C. PENGADILAN).....	10
	• Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	11
	• Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	12
	• Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	12
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	13
	KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN	
	A. Mutasi	15
	B. Promosi	16
	C. Pensiun.....	16
	D. Diklat	16
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN , SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI	18
	INFORMASI	
	A. Pengelolaan Keuangan	18
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	24
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	25
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	28
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	28
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	29
	C. Inovasi Pelayanan Publik	29
BAB VI	PENGAWASAN	31
	A. Internal	31
	B. Evaluasi	32
BAB VII	PENUTUP	33
	A. Kesimpulan	33
	B. Daftar Inovas.....	40

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B merupakan salah satu badan peradilan di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran meliputi 2 (dua) Kabupaten Asahan dan Batu Bara, wilayah Kabupaten Asahan sebanyak 25 Kecamatan, kecuali Kec. Tanjung Balai, Kec. Sei Kepayang, Kec. Air Joman, Kec. Simpang Empat, Kec. Pulau Rakyat Kec. Bandar Pulau, dan seluruh Kabupaten Batu Bara sebanyak 12 Kecamatan.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan tahun 2023 tersebut berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2023 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kisaran terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang dibawahnya, Pengadilan Negeri

Kisaran dari bulan Maret 2020 melaksanakan Persidangan secara Online dengan Aplikasi Zoom Meeting, sehingga para terdakwa tidak perlu datang ke kantor pengadilan, cukup melaksanakan persidangan melalui Zoom Meeting.

Pengadilan Negeri Kisaran sejak Tahun 2019 sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI No: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tahun 2023 seluruh perkara sudah didaftarkan melalui e-Court. Sepanjang tahun 2023 ada **76 gugatan, 1 bantahan, 13 gugatan sederhana dan 145 permohonan yang di daftarkan melalui ecourt**. Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terdapat 76 perkara gugatan, bantahan dan gugatan sederhana yang sudah bersidang secara elektronik/e-Litigasi dan para pihak langsung dapat mengambil salinan putusan yang bertanda tangan elektronik panitera di akun ecourt masing-masing pihak tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini mewujudkan terciptanya asas peradilan yang mudah, sederhana dan berbiaya ringan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan *template* dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen *template* hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Di tahun 2018, manajemen perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin disempurnakan dengan terus melakukan *update* sehingga per bulan Desember 2023 Pengadilan Negeri Kisaran telah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan *update* terbaru (SIPP) V.5.1.0. yang mana terdapat penambahan fitur meliputi penambahan menu E-Berpadu. Pengadilan Negeri Kisaran juga telah melaksanakan Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang ditandai dengan telah aktifnya e-Court pada tanggal 31 Oktober 2019 dan sudah banyak Advokat dan Masyarakat yang sudah melalui aplikasi e-Court untuk Pendaftaran Perkara.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2023 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan Website, dan peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan dan yang terbaru aplikasi elektronik berkas pidana terpadu (E-Berpadu) yang terintegrasi ke 3 (tiga) instansi yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

4. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 7; 8; dan 9 Tahun 2016

Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan Sosialisasi tentang Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

VISI dan MISI

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KISARAN YANG AGUNG “

2. Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kisaran
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kisaran
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kisaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B memiliki Motto yaitu:

MOTTO

“BERSAMA”

== BERINTEGRITAS, SANTUN, ADIL, MELAYANI, AKUNTABEL ==

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B sebagai kawal terdepan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B selain menjalankan tugas- tugasnya juga menjalankan fungsinya yang antara lain adalah:

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)** yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan** yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan** yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasehat** yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif** yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/ tatalaksanaan, dan keuangan/ umum/ perengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya** antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



BAB II

A. KEADAAN PERKARAN DI PERADILAN UMUM

Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 99,47% dari tahun 2022. Berikut uraian keadaan perkara Pengadilan Negeri Kisaran.

• Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2022 dan Tahun 2023:

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2022	Perkara Masuk 2023
1	Pidana	1021	1010
2	Pidana Cepat	146	72
3	Pidana Praperadilan	14	10
4	Pidana Khusus Anak	27	28
5	Lalu Lintas	587	1662
6	Perdata Gugatan	85	80
7	Perdata Permohonan	136	151
8	Gugatan Sederhana	11	13
9	Konsinyasi	29	13
<i>Total Perkara</i>		<i>2056</i>	<i>3039</i>

• Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2023:

No	Jenis Perkara	Perkara yang diputus 2023	Mengajukan Upaya Hukum (Banding)	Ket
1	Pidana	908	221	
2	Pidana Cepat	72	2	
3	Pidana Praperadilan	10	-	
4	Pidana Khusus Anak	29	3	
5	Perdata Gugatan	75	21	

6	Perdata Permohonan	151	21	
7	Gugatan Sederhana	10	-	
8	Permohonan Konsinyasi	25	-	

● **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2023:**

No	Jenis Perkara	Perkara yang diputus 2023	Perkara Masuk 2023	Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi)
1	Pidana	908	1010	143
2	Pidana Cepat	72	72	-
3	Pidana Praperadilan	10	10	-
4	Pidana Khusus Anak	29	28	1
5	Perdata Gugatan	75	80	16
6	Perdata Permohonan	151	151	-
7	Gugatan Sederhana	10	13	-
8	Permohonan Konsinyasi	25	13	-

● **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2023:**

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2023	Mengajukan Upaya Hukum (PK)	Ket
1	Pidana	1010	10	-
2	Pidana Cepat	72	-	-
3	Pidana Praperadilan	10	-	-
4	Pidana Khusus Anak	28	-	-
5	Perdata Gugatan	80	2	-
6	Perdata Permohonan	151	-	-
7	Gugatan Sederhana	13	-	-
8	Permohonan Konsinyasi	13	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut ini uraian keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Kisaran tahun 2023 :

● **Jumlah Sisa Perkara yang di Putus**

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Perkara Masuk 2023	Perkara yang diputus 2023	Sisa Perkara	Ket.
1	Pidana	104	1010	908	206	-
2	Pidana Cepat	-	72	72	-	-
3	Pidana Praperadilan	-	10	10	-	-
4	Pidana Khusus Anak	1	28	29	-	-
5	Lalu Lintas	-	1662	1662	-	-
6	Perdata Gugatan	22	80	75	27	-
7	Perdata Permohonan	-	151	151	-	-
8	Gugatan Sederhana	1	13	10	4	-
9	Permohonan Konsinyasi	12	13	25	0	-

● **Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu**

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Perkara Masuk 2023	Perkara yang diputus 2023	Perkara yang di Putus Tepat Waktu
1	Pidana	104	1010	908	908
2	Pidana Cepat	-	72	72	72
3	Pidana Praperadilan	-	10	10	10
4	Pidana Khusus Anak	1	28	29	29
5	Lalu Lintas	-	1662	1662	1662
6	Perdata Gugatan	22	80	75	73
7	Perdata Permohonan	-	151	151	151
8	Gugatan Sederhana	1	13	10	10
9	Permohonan Konsinyasi	12	13	25	25

● **Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK**

PERKARA BANDING :

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk 2023	Perkara diputus 2023	Perkara Banding	Perkara yang Tidak banding
1	Pidana	1010	908	221	687
2	Pidana Cepat	72	72	2	70
3	Pidana Praperadilan	10	10		10
4	Pidana Khusus Anak	28	29	3	26
5	Perdata Gugatan	80	75	21	54
6	Perdata Permohonan	151	151	-	151
7	Gugatan Sederhana	13	10	-	10
8	Permohonan Konsinyasi	13	25	-	25

PERKARA KASASI :

<i>No</i>	<i>Jenis Perkara</i>	<i>Perkara Masuk 2023</i>	<i>Perkara diputus 2023</i>	<i>Perkara Kasasi</i>	<i>Perkara yang Tidak Kasasi</i>
<i>1</i>	Pidana	1010	908	143	765
<i>2</i>	Pidana Cepat	72	72		72
<i>3</i>	Pidana Praperadilan	10	10		10
<i>4</i>	Pidana Khusus Anak	28	29	1	20
<i>5</i>	Perdata Gugatan	80	75	16	59
<i>6</i>	Perdata Permohonan	151	151	-	151
<i>7</i>	Gugatan Sederhana	13	10	-	10
<i>8</i>	Permohonan Konsinyasi	13	25	-	25

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI :

<i>No</i>	<i>Jenis Perkara</i>	<i>Perkara Masuk 2023</i>	<i>Perkara diputus 2023</i>	<i>Perkara PK</i>	<i>Perkara yang Tidak PK</i>
<i>1</i>	Pidana	1010	908	10	898
<i>2</i>	Pidana Cepat	72	72	-	72
<i>3</i>	Pidana Praperadilan	10	10	-	10
<i>4</i>	Pidana Khusus Anak	28	29	-	29
<i>5</i>	Perdata Gugatan	80	75	2	73
<i>6</i>	Perdata Permohonan	151	151	-	151
<i>7</i>	Gugatan Sederhana	13	10	-	10
<i>8</i>	Permohonan Konsinyasi	13	25	-	25

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI :

<i>No</i>	<i>Bagian</i>	<i>Perkara Masuk 2023</i>	<i>Perkara diputus 2023</i>	<i>Mediasi</i>	<i>Ket</i>
<i>1</i>	Perdata Gugatan	80	75	2	

JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHASIL DIVERSI :

<i>No</i>	<i>Bagian</i>	<i>Perkara Masuk 2023</i>	<i>Perkara diputus 2023</i>	<i>Berhasil Diversi</i>	<i>Ket</i>
<i>1</i>	Pidana Khusus Anak	28	29	1	

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008 dan diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*) melalui penilaian terhadap 7 kriteria :

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
5. Proses Manajemen (*Management Process*)
6. Sistem Dokumen (*Document System*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki system pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Kisaran sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum tentunya berkewajiban untuk turut menyukseskan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna

pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Kisaran telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 Nopember 2017 di Makassar dengan nilai “A” (*Excellent*). Setelah itu, pada saat dilakukan assesmen surveilan kedua pada tanggal 3 November 2022 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan, dan sudah dilakukan KEKA Badan Peradilan Umum tanggal 3 November 2022 Pengadilan Negeri Kisaran berhasil mempertahankan nilai tersebut.

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

● **POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B menyediakan Pos Layanan Bantuan Hukum untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Kisaran dilaksanakan oleh LBH CAKRAWALA NUSANTARA INDONESIA (YLBH-CNI) Kabupaten Asahan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan LBH tersebut serta Surat Perintah Kerja Nomor W2.U11/6/KU.03.05/1/2023 tanggal 3 Januari 2023 dari PPK Pengadilan Negeri Kisaran.

Anggaran yang dialokasikan pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran

2023 Nomor DIPA-005.03.2.400390/2023 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut adalah untuk membayar Honor advokat/ pengacara piket yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam piket. Per tanggal 31 Desember 2023 anggaran tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya.

- **SIDANG KELILING/ PELAYANAN TERPADU**

Tidak ada kegiatan Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1 B sepanjang tahun 2023.

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkar. Pengadilan Negeri Kisaran tahun Anggaran 2023 tidak memiliki alokasi anggaran pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin pada DIPA Pengadilan Negeri Kisaran.



BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya di Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Kisaran) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan. Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap sumber daya manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*).

Pada tahun 2023, jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Kisaran mendapat tambahan Panitera Pengganti 1 orang. Dan pada tahun 2023 Sumber daya manusia meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kisaran.

Pengadilan Negeri Kisaran memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, sehingga jumlah SDM yang ada saat ini sangatlah tidak ideal untuk sebuah Pengadilan Negeri Kelas 1 B yang menangani lebih dari 1.000 perkara setiap tahunnya, Pengadilan Negeri Kisaran sudah memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran yang bersertifikasi.

Berikut Rincian kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kisaran. Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Nama	Jabatan
1.	Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.	Ketua
2.	Hendra Utama Sotardodo,S.H.,M.H.	Wakil Ketua
3.	Yohana Timora Pangaribuan., SH., M.Hum.	Hakim
	Antoni Trivolta., S.H.	
	Nelly Rakhmasari Lubis., S.H., M.H.	
	Tetty Siska., S.H., M.H.	
	Irse Yanda Perima., S.H., M.H.	
4.	M. Ilyas,S.H	Panitera
5.	Mediana Br. Tarigan., SE.	Sekretaris
6.	Buyung Hardi., SH.	Panitera Muda Perdata
7.	Addhie Yus Pramana Putra., SH., M.H.	Panitera Muda Pidana
8.	Pertolongan Laowo,S.H	Panitera Muda Hukum
9.	Noni Aprianti Damanik, SH.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan
10.	Muhammad Reza Lubis, SH	Kasubbag Kepegawaian & Ortala
11.	Diana Romin Harahap, SH.	Kasubbag Umum dan Keuangan
12.	Darwis Tarigan, S.H . Ali Ustadz . Helmi. Meilan Monanita., S.H. Asma Laili Siregar,S.H	Panitera Pengganti
13	Mursal Pahri.	Jurusita
14.	Mhd. Saleh. Aser Hutabarat.	Jurusita Pengganti
15.	Ribka Br. Ginting. Muhammad Fikry Harahap, S.H	Analisis Perkara Peradilan

	Hana Serbina Br. Sembiring, S.H	
16.	Apriyanti Mandasari Siahaan , S.Sos	Analisis SDM Aparatur
17.	Indra Satriawan Perdana, S.Kom Arnimisari Juliana Ambarita, S.Sos	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
18.	Desy Ratnasari Purba, A.Md.AB	Arsiparis
19.	Iin Angelina Pangaribuan, A.Md	Pengadministrasi Registrasi Perkara
20.	Nelly Saputri Manalu, A.Md	Pengelola BMN

• **MUTASI**

Mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Asal	Tujuan
1.	Hendra Utama Sotardodo,S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A khusus	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B
2.	Pertolongan Laowo,S.H	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Madina Kelas I B	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B
3.	Asma Laili Siregar,S.H	Analisis Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas I B	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B

Mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Asal	Tujuan
1.	Erika Sari Emsah Ginting,S.H.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B
2.	Sitiur Mala Sitorus,S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tarutung Kelas II
3.	Subakti,S.H	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I B

• **PROMOSI**

Pelaksanaan promosi pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kisaran adalah sejumlah 4 (empat) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Asal	Tujuan
1.	Erika Sari Emsah Ginting,S.H.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B
2.	Sitiur Mala Sitorus,S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tarutung Kelas II
3.	Subakti,S.H	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kelas I B

• **PENSIUN**

Sepanjang tahun 2023 tidak ada pegawai yang pensiun.

• **DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)**

Sepanjang tahun 2023 SDM Teknis/ Non Teknis yang mengikuti diklat adalah :

No.	Nama Diklat	Nama Peserta	Tempat diklat
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme Bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
2.	English For Social And Office Comunication	Iin Angelina Pangaribuan, A.Md., A.B.	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan – Mahkamah Agung Republik Indonesia
3.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan – Mahkamah Agung Republik Indonesia
4.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak	Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan

	Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia		dan Pelatihan Hukum dan Peradilan – Mahkamah Agung Republik Indonesia
5.	Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1) M.Ilyas, S.H. 2) Mediana Br Tarigan, S.E. 3) Muhammad Reza Lubis, S.H. 4) Noni Afrianti Damanik, S,H 	Pengadilan Tinggi Medan



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Teknis (DIPA 03)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat teknis pada Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebesar Rp. **257.700.000,-** (Dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-005.03.2.400390/2023 tanggal 30 November 2022. Jumlah tersebut di atas seluruhnya merupakan pagu anggaran untuk belanja barang.

DIPA tersebut mengalami revisi administrasi berupa *update* Halaman III DIPA sebanyak 5 (lima) kali dan penyamaan data hasil revisi POK sebanyak 5 (lima) kali tanpa mengakibatkan perubahan atas nilai total pagu dalam rangka peningkatan efektivitas penyerapan anggaran.

Adapun **realisasi** terhadap anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

BELANJA BARANG				
NO	PAGU DIPA Rp	REALISASI / PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI Rp
		Rp	%	
1	257.700.000,-	257.376.500,-	99,87,-	323.500,-

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2023:

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1.	Belanja Pengiriman Berkas Banding dan Kasasi Pos	28.949.000,-	28.630.500,-	98,9,-
2.	Belanja Bahan dan Minutasi	10.465.000,-	10.460.000,-	99,95,-
3.	Belanja ATK Perkara Pidana	91.017.000,-	91.017.000,-	100,-
4.	Belanja Jasa Advokat Piket POSBAKUM	31.200.000,-	31.200.000,-	100,-
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.240.000,-	60.240.000,-	100,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.829.000,-	35.829.000,-	100,-
	Jumlah	257.700.000,-	257376.550,-	99,87,-

Realisasi Anggaran Non Teknis (DIPA 01)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat non teknis pada Pengadilan Negeri Kisaran adalah sebesar Rp. 5.267.017.000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Kisaran Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-005.03.2.400390/2023 tanggal 30 November 2022. Jumlah tersebut di atas seluruhnya merupakan pagu anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

DIPA Pengadilan Negeri Kisaran mengalami 5 (lima) kali revisi DIPA berupa *update* Halaman III DIPA, penyamaan data revisi POK dan revisi penambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai dan belanja langganan listrik. Rincian realisasi anggaran tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai:

NO	BELANJA PEGAWAI			
	REVISI PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
<i>1</i>	3.955.645.000,-	3.897.572.583,-	98,53	81.910.591,-

Rincian Realisasi Belanja Pegawai :

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
<i>1</i>	Belanja Gaji Pokok PNS	1.550.613.000,-	1.550.011.200,-	99,96,-
<i>2</i>	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000,-	20.774,-	90,32,-
<i>3</i>	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	146.043.000,-	118.192.170,-	80,93,-
<i>4</i>	Belanja Tunjangan Anak PNS	39.926.696,-	39.926.696,-	99,86-
<i>5</i>	Belanja Tunjangan Struktural PNS	36.400.000,-	36.400.000,-	100,-
<i>6</i>	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.590.820.000,-	1.565.015.000,-	98,38,-
<i>7</i>	Belanja Tunjangan PPH PNS	193.302.000,-	183.440.483,-	94,9,-
<i>8</i>	Belanja Tunjangan Beras PNS	94.363.260,-	94.363.260,-	99,93-
<i>9</i>	Belanja Uang Makan PNS	282.492.000,-	288.883.000,-	102,26,-
<i>10</i>	Belanja Tunjangan Umum PNS	21.544.000,-	21.320.000,-	98,96,-

Total		3.955.645.000,-	3.897.572.583,-	98,53,-

Belanja Barang:

NO	BELANJA BARANG			
	PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
I	1.306.372.000,-	1.305.738.160,-	99,95,-	633.840,-

Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2023:

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
1.	Belanja Barang Operasional	655.959.000,-	655.600.890,-	99,95,-
2.	Belanja Barang Persediaan	55.107.000,-	55.092.600,-	99,97,-
3.	Belanja Jasa	15.774.000,-	15.738.698,-	99,78,-
4.	Belanja Pemeliharaan	539.692.000,-	539.489.472,-	99,96,-
5.	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	28.800.000,-	28.776.500,-	99,92,-
6.	Belanja Barang Non Operasional	11.040.000,-	11.040.000,-	100,-
Jumlah		1.306.372.000,-	1.305.738.160,-	99,95,-

Belanja Modal:

NO	BELANJA MODAL			
	PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
I	5.000.000,-	4.612.050,-	92,24,-	0,-

Rincian Belanja Modal Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2023:

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp	%
I.	Printer	5.000.000,-	4.612.050	100,-
Jumlah		5.000.000,-	4.612.050,-	100,-

Manajemen Aset Barang Milik Negara

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Selama tahun 2023 Pengadilan Negeri Kisaran mengelola aset/ barang milik Negara meliputi :

1. Tanah

Beberapa aset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2023 dapat dilihat di bawah ini :

Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Kisaran

No	Tanah	Jumlah Bidang Tanah	Total Luas Tanah (m2)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	6	4,229
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	5,269

2. Gedung dan Bangunan

Daftar Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran yaitu;

No	Gedung Bangunan	Satuan (Unit)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
3	Bangunan Tempat Sidang/Zititing Plaat	1
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	12
5	Pagar Permanen	1
6	Bangunan Ruang Sidang Anak	1

Dari tabel diatas Pengadilan Negeri Kisaran ada Rehabilitasi Gedung Bagunan yaitu Ruang sidang Anak yang Anggarannya dari APBD Kabupaten Asahan.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember 2023 yaitu :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus Toyota Kijang (BK 615 V)	2004	-	Rusak Ringan	-	Pinjam pakai dari Pemkab Asahan
2.	Minibus Toyota Innova (BK 4 V)	2008	Baik	-	-	Milik sendiri
3.	Minibus Toyota Innova (BK 1147 BB)	2014	Baik	-	-	Hibah dari Pemkab Batu Bara
4.	SUV Mitsubishi Pajero (BK 1241 V)	2017	Baik	-	-	Pinjam pakai dari Pemkab Asahan
5.	SUV Mitsubishi Pajero	2018	Baik	-	-	Hibah dari

	(BK 1192 BB)					Pemkab Batu Bara
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda NF125SD	2005		Rusak Ringan	-	BK 2256 V
2.	Honda NF125SD	2005	-	Rusak Ringan	-	BK 2257 V
3.	Honda NF125SD	2005	-	Rusak Ringan	-	BK 2202 V
4.	Honda NF125SD	2007	-	Rusak Ringan	-	BK 2391 V
5.	Honda NF125SD	2008	-	Rusak Ringan	-	BK 2763 V
6.	Honda NF125SD	2008	-	Rusak Ringan	-	BK 2777 V

4. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	8	6 Baik	1 Rusak Ringan	1 Rusak Berat	-
4	Rumah Dinas Panitera	1	Baik	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	Baik	-	-	-

5. Sarana/ Prasarana

No	Sarana/ Prasarana Gedung	Jumlah (Unit)	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	5	Baik
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Baik
8	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Baik
9	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Baik
10	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
11	Ruang Umum dan Keuangan	1	Baik
12	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Baik
13	Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan	1	Baik

14	Ruang Perpustakaan	1	Baik
15	Ruang Mediasi	1	Baik
16	Ruang Caucus	1	Baik
17	Ruang Tunggu Laktasi/Kesehatan	1	Baik
18	Ruang Teleconference	1	Baik
19	Ruang Arsip Pidana	1	Baik
20	Ruang Arsip Perdata	1	Baik
21	Ruang Tunggu Umum	1	Baik
22	Ruang/Kantin	1	Sederhana
23	Ruang Posbakum	1	Baik
24	Ruang/Musholah	1	Baik
25	Ruang Jaksa	1	Baik
26	Ruang Humas	1	Baik
27	Ruang PTSP	1	Baik
II	Ruang Rapat	1	Baik
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Mesin Pompa air PMK	1	
2	Lemari Penyimpan	1	
3	Lemari Kayu	26	
4	Rak Besi	7	
5	Rak Kayu	2	
6	Filing Cabinet Besi	28	
7	Brandkas	5	
8	Lemari Display	3	
9	Tabung Pemadam Api	7	
10	CCTV – Camera Control Television System	5	
11	White Board	4	
12	Mesin Absensi	1	
13	Overhead Projector	2	
14	Hand Metal Detector	1	
15	Meja Kerja Kayu	105	
16	Kursi Besi/Metal	107	
17	Kursi Kayu	120	
18	Sice	10	
19	Bangku Panjang Besi/Metal	23	
20	Bangku Panjang Kayu	28	
21	Meja Rapat	4	
22	Meja Komputer	1	
23	Meja Resepsionis	3	
24	Sketsel	4	
25	Kursi Fiber Glas/Plastik	24	
26	Jam Mekanis	11	
27	A.C. Split	23	
28	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3	
29	Kipas Angin	15	
30	Televisi	11	
31	Amplifier	1	
32	Loudspeaker	6	

33	Sound System	3	
34	Wireless	1	
35	Microphone	17	
36	Lambang Garuda Pancasila	1	
37	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	
38	Lambang Instansi	1	
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
40	Analog/Digital Receiver	1	
41	Bracket Standing Peralatan	8	
42	LCD Monitor	1	
43	Pesawat Telephone	1	
44	Facsimile	1	
45	Genset	1	
46	P.C Unit	33	
47	Lap Top	7	
48	Note Book	9	
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
51	Server	2	
52	Router	1	
53	Genset	1	
54	Sound System	1	
55	Kursi Ruang PTSP	6	
56	Termo Gun	1	
57	Anjungan Mesin Antrian	2	

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Nama Asset (Belanja Modal)	Jumlah (Unit/Set)	Harga Persatuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4.612.050	4.612.050

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

a. Pembukuan, Pencatatan, dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Selama periode tahun anggaran 2023, Pengadilan Negeri Kisaran secara rutin dan kontiniu melaksanakan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menggunakan aplikasi Persediaan, SIMAK – BMN, SIMAN, dan SIMANTAP yang merupakan produk Kementerian Keuangan.

b. Penghapusan Asset /Barang Milik Negara (BMN)

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kisaran tidak adanya pelaksanaan penghapusan BMN

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

• **Implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Kisaran**

Pengadilan Negeri Kisaran juga telah melaksanakan Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019. Tahun 2023 seluruh perkara sudah didaftarkan melalui e-Court. Sepanjang tahun 2023 ada 76 gugatan, 1 bantahan, 13 gugatan sederhana dan 145 permohonan yang di daftarkan melalui ecourt. Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah menerapkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terdapat 16 perkara gugatan, bantahan dan gugatan sederhana yang sudah bersidang secara elektronik/e-Litigasi dan para pihak langsung dapat mengambil salinan putusan yang bertanda tangan elektronik panitera di akun ecourt masing-masing pihak tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini mewujudkan terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang ditandai dengan telah aktifnya *e-court* pada tanggal 31 Oktober 2019.

• **Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kisaran**

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan layanan kepada publik, namun sangat diperlukan dalam percepatan proses Administrasi dalam lingkungan Pengadilan. Hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi administrasi mulai dari KOMDANAS, SIMARI, SIMPONI, SIKEP, (Sistem informasi Kepegawaian), SEPEDA, SIMAK-BMN, SAIBA, SAKTI, E-BIMA, SIMPEG, SIWAS, Aplikasi SIPT (sistem informasi pidana terintegrasi), Aplikasi Sitasya (Silakan tanya saya) Informasi tentang info Perkara dan lain sebagainya.

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima, Pengadilan Negeri Kisaran telah menggunakan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan Mahkamah Agung R.I. Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

Perangkat Lunak

Untuk menunjang sarana dan prasarana, khususnya perangkat keras (hardware) pada Pengadilan Negeri Kisaran selanjutnya telah dilengkapi dengan beberapa perangkat lunak (software) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, baik secara kelembagaan maupun secara personal dari masing-masing aparat peradilan. Berikut beberapa perangkat lunak (software) yang terdapat pada perangkat keras di Pengadilan Negeri Kisaran perangkat lunak (software) pada Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2023

No	Nama perangkat lunak (software)	Fungsi
1.	Aplikasi Perpustakaan	Dapat membantu petugas pustaka dalam menginventarisir buku-buku perpustakaan dan memudahkan pengguna dalam mencari buku-buku yang berada di perpustakaan Pengadilan Negeri Kisaran. Pada saat ini masih dalam tahap pelaksanaan.
2.	Aplikasi E-Super	Optimalisasi Penyelenggaraan Administrasi Barang Persediaan melalui Aplikasi Pengajuan Permintaan Barang Persediaan Berbasis Internet bagi Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran
3.	Aplikasi Silaci Satu Online	Sistem Layanan Cuti, Sakit, dan Surat Tugas Online bagi Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran
4.	SIPP	Administrasi perkara
5.	E-Rekon, GPP, SAIBA, SAS, PPSPM, OM-SPAN, MONEV-PA	Administrasi keuangan
6.	SAPK, SIKEP, SEPEDA	Administrasi kepegawaian
7.	Persediaan, SIMAK BMN	Administrasi barang milik negara
8.	SAKTI (sistem aplikasi keuangan tingkat instansi)	Administrasi Perencanaan Anggaran dan Revisi Anggaran
9.	Aplikasi MIS	Monitoring Implementasi SIPP
10.	Aplikasi e-Court	Administrasi Pendaftaran Perkara secara Online
11.	Aplikasi Panggilan Sidang	Sistem Layanan Panggilan Sidang kepada para pihak yang bersidang
13.	Aplikasi PTSP	Pendistribusian Surat Masuk melalui Elektronik
14.	Monitor Jadwal Sidang	Pengumuman Jadwal Sidang
15.	Aplikasi SIPT (Sistem Informasi Pidana Terpadu)	Sistem Informasi Pidana yang mengintegrasikan dengan Stakeholder yang terkait.
16.	E- Brosur	Brosur Elektronik Informasi layanan
17.	Aplikasi Sitasya	Sistem Informasi berbasis WhatsApp (WA) Gate-Way yang menginformasikan tentang info Perkara, Jadwal Sidang, Tilang, Sisa Panjar, Putusan, Sita/ Geledag.
18.	Era Terang	Layanan Permohonan Surat keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon

		dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP maupun Komputer/PC)
19.	Aplikasi E-Berpadu	Integrasi berkas pidana antar Penegak Hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, penetapan diversi, dan izin besuk tahanan
20.	JDIH	wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat
21.	E-Bima	Aplikasi untuk Memonitoring Pelaksanaan Anggaran di Mahkamah Agung dan Satker dibawahnya
22.	E-Iplans	Sebuah Sistem Untuk Menyusun Anggaran Dengan Tahapan Berjenjang Pada Satuan Kerja Di Bawah Mahkamah Agung RI
23.	E-LIPP	Elektronik Layanan Informasi Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran

Selain perangkat lunak yang disebutkan diatas Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah mempunyai website dengan nama domain www.pn-kisaran.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online dengan situs sipp.pn-kisaran.go.id untuk mempermudah akses informasi pencari keadilan dan aplikasi perpustakaan secara online dengan situs perpustakaan.pn-kisaran.go.id untuk dapat meminjam dan membaca buku pada koleksi pustaka digital yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kisaran. Aplikasi ini dapat diunduh langsung di perangkat komputer ataupun handphone/smartphone kita, baik yang memiliki sitem operasi Android maupun IOS.

BAB V PENINGKAT PELAYANAN PUBLIK

● Akreditasi Penjamin Mutu

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008 dan diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Kisaran merupakan Pengadilan yang ikut serta dalam Daftar peserta Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan sudah dilakukan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, Pengadilan Negeri Kisaran belum berhasil menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent –ICPE*).

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki system pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Kisaran sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum tentunya berkewajiban untuk turut menyukseskan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu

pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Kisaran telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 Nopember 2017 di Makassar dengan nilai “A” (*Excellent*). Setelah itu, pada saat dilakukan assesmen surveilan pertama pada tanggal 7 Mei 2019 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan, dan sudah dilakukan KEKA Badan Peradilan Umum tanggal 3 November 2023 Pengadilan Negeri Kisaran berhasil mempertahankan nilai tersebut.

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

● **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pengadilan Negeri Kisaran pada tahun 2019 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan Website, dan peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.

● **Inovasi Pelayanan Publik**

Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah mempunyai website dengan nama domain www.pn-kisaran.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online dengan situs sipp.pn-kisaran.go.id untuk mempermudah akses informasi pencari keadilan dan

Aplikasi Sitasya (silakan tanya saya) merupakan inovasi berbasis WhatsApp (WA) Gate-Way yang menginformasikan tentang Perkara, Jadwal sidang, Info Tilang, Sisa Panjar, Putusan, Sita/Geledah. Pengadilan Negeri Kisaran membuat Inovasi Aplikasi SIPT (sistem informasi pidana terpadu) suatu Aplikasi andalan Pengadilan Negeri Kisaran yang mana sangat membantu Stakeholder yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Perasyarakatan, dimana Polisi bisa mengajukan permohonan izin sita dan izin geledah melalui Aplikasi SIPT.

Pengadilan Negeri Kisaran juga sudah menarapkan Area Steril yang mana para pencari keadilan tidak bisa dengan bebas untuk memasuki Area Steril tersebut dikarenakan menggunakan Access Card Door, dan untuk Sarana dan Prasarana para pencari keadilan Pengadilan Negeri Kisaran sudah menyiapkan Ruang Tunggu yang dilengkapi Ac dan Televisi.



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan rutin / reguler secara kelembagaan adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga oleh Pengadilan Tinggi Medan yang dilakukan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik secara administratif maupun secara teknis peradilan, sedangkan pengawasan dalam tubuh instansi Pengadilan Negeri Kisaran itu sendiri secara langsung dilakukan Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim-hakim pengawas bidang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Koordinator Pengawas.

SK Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7869/KPN/SK.OT1.2/XII/2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB :

1. Koordinator Pengawas / Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H
2. Hakim Pengawas Bidang Ortala / Tety Siskha Simorangkir.S.H.,M.H,
3. Hakim Pengawas Bidang Pidana / Antoni Trivolta,S.H,
4. Hakim Pengawas Bidang Perdata / Irse Yanda Perima, SH., M.H
5. Hakim Pengawas Bidang Hukum / Yohana Timora Pangaribuan,S.H.,M.Hum
6. Hakim Pengawas Bidang Keuangan, Umum dan Perpustakaan / Nelly Rakhmasuri Lubis,S.H.,M.H
7. Hakim Pengawas Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara / Irse Yanda Perima, SH., M.H.

Secara rutin hasil temuan dari Hakim Pengawas akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk dilakukan evaluasi dan menjadi bahan dalam mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dan mendesak.

Selanjutnya pengawasan secara eksternal telah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas. Pengadilan Negeri Kisaran telah menyediakan sarana dan prasarana kepada siapa saja untuk mengajukan laporan dan pernyataan keberatannya terhadap kinerja badan dan perorangan apara peradilan, baik secara tertulis maupun secara elektronik. Semua laporan dan pengaduan akan mendapat porsi penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses dan mekanisme pelaporan dan pengaduan telah disosialisasikan secara terbuka

di papan pengumuman dan tempat publikasi lain di Pengadilan Negeri Kisaran.

B. EVALUASI

Evaluasi dalam laporan ini dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat intern terkait pembahasan hasil kinerja aparat peradilan, sedangkan tindakan evaluasi itu sendiri merupakan bagian dari tupoksi Pengadilan Negeri Kisaran yang finalisasi dari evaluasi itu sendiri nantinya akan berujung pada pimpinan Pengadilan Negeri Kisaran. Secara rutin tindakan evaluasi kinerja tersebut selanjutnya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan, yaitu dalam rapat Kepaniteraan, Kesekretariatan serta dalam rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparat peradilan.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Kisaran. Penanganan perkara berjalan dengan sangat baik dengan rasio penanganan perkara sebesar 84,23%. Anggaran DIPA dapat direalisasikan dengan maksimal sesuai dengan program dan output yang ditetapkan. Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA sebesar 98,88% dan DIPA 03 Ditjen Badilum sebesar 99,87 %. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka Aparatur Pengadilan telah diikutsertakan dalam berbagai Diklat dan sertifikasi, pelatihan, seminar dan sosialisasi yang berkaitan dengan Tupoksinya masing-masing.

Untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas maka Pengadilan Negeri Kisaran telah memiliki sarana maupun prasarana yang cukup memadai. Gedung kantor yang bersih dan nyaman serta tersedia fasilitas untuk penyandang disabilitas. Sarana ruang PTSP, ruang tunggu pengunjung yang nyaman serta berbagai aplikasi pendukung untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait layanan pengadilan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, Pengadilan Negeri Kisaran telah memiliki kinerja yang baik dalam penanganan perkara, administrasi dan anggaran. Namun kami menyadari bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dan dibutuhkan dukungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Menambah Diklat sumber daya manusia terutama bidang teknologi (IT);
2. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
3. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembagunan Sarana Prasarana.
4. Menambah jumlah pegawai.

LAMPIRAN



Pengajian Rutin PN Kisaran



Kebaktian KRISMA PN Kisaran



Rapat Rutin Kepaniteraan



Rapat Rutin Kesekretariatan



Rapat Rutin Koordinator Pengawasan dan Hakim Pengawas



Rapat Rutin Bulanan



Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan



Rapat Tinjauan Manajemen



Acara Futsal Competition Piala Ketua Pengadilan Negeri Kisaran



Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Medan dalam rangka pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Negeri Kisaran



Opening/Closing Meeting Pengawasan/Pembinaan, Surveilans APM dan Pendampingan ZI



Apel Senin Pagi yang di ikuti oleh Hakim Pejabat Fungsional&Struktural, ASN dan PPNPN



Apel Jumat Sore yang di ikuti oleh Hakim Pejabat Fungsional&Struktural, ASN dan PPNPN

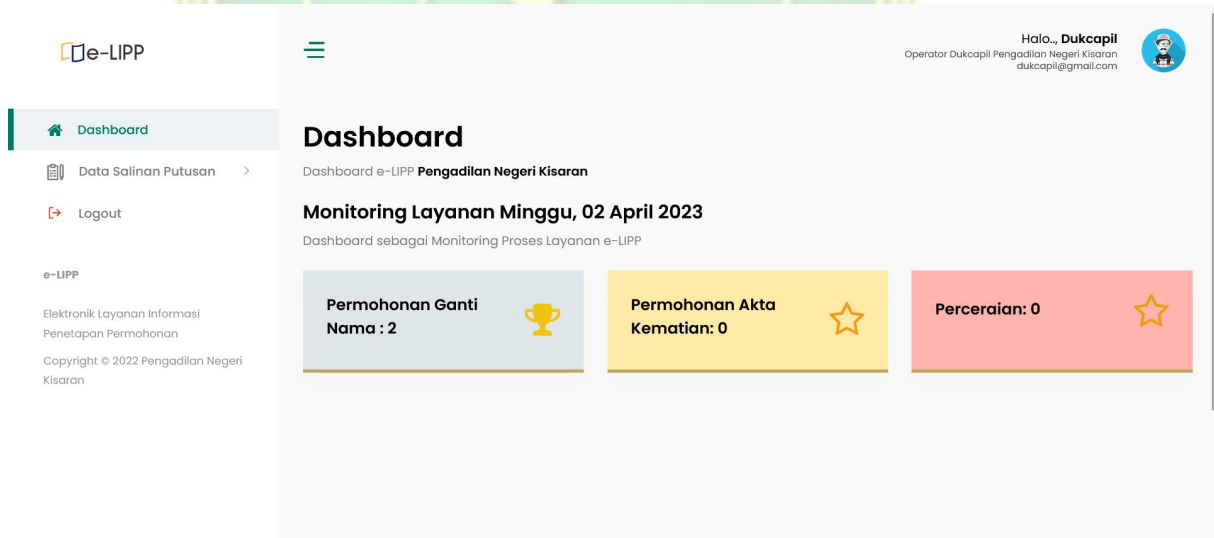


Supervisi PTSP



DAFTAR INOVASI PENGADILAN NEGERI KISARAN

1. APLIKASI e-LIPP (Elektronik Layanan Informasi Penetapan Permohonan)



1. Memudahkan pertukaran data antara Pengadilan Negeri Kisaran dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Menyediakan Salinan Penetapan yang dapat didownload oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Menjadi bank data Penetapan Pengadilan terkait data kependudukan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Terjaganya prinsip kehati-hatian dalam memeriksa keaslian Salinan Penetapan

2. APLIKASI SITASYA (SILAHKAN TANYA SAYA)

PENGADILAN NEGERI KISARAN IB
Jl. Jen. Ahmad Yani No. 33 Kec. Kota Kisaran Barat
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211

Hai, Saya SiTASYA
(SILAKAN TANYA SAYA)
ASISTEN VIRTUAL PENGADILAN NEGERI KISARAN

Ada Yang Bisa Saya Bantu...?
Silahkan scan QRCode atau
simpan nomor SiTASYA

0812 6584 6300

RID

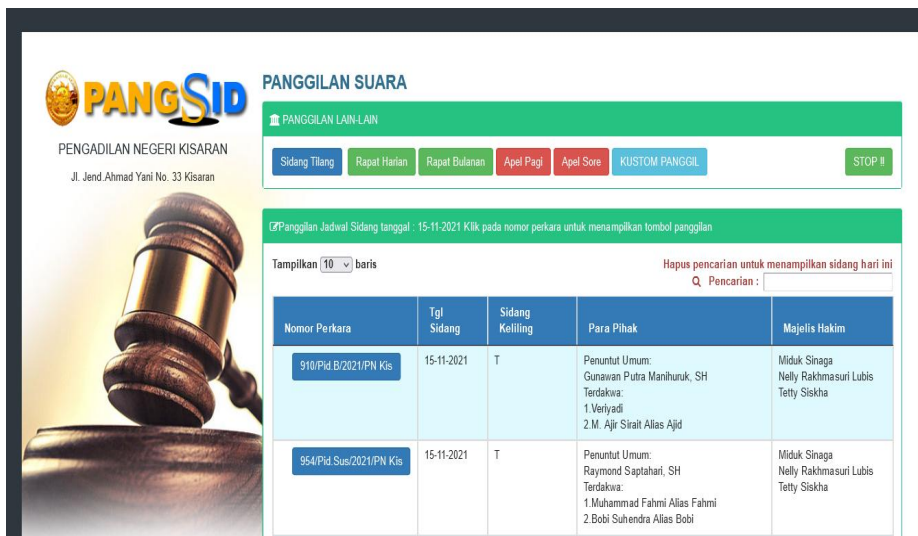
Informasi :
- Surat Keterangan Online / Eraterang
- E-Court
- Siwas

Si-Tasya- Asisten Virtual Pengadilan Negeri Kisaran merupakan Inovasi berbasis WhatsApp (WA) Gate-Way yang menginformasikan tentang:

1. Info perkara
2. Jadwal Sidang
3. Info Tilang
4. Sisa Panjar
5. Putusan
6. Sita/Geledah

Dimana, jika pencari keadilan cukup mengirim pesan dan secara otomatis akan diarahkan pada info apa saja yang kita inginkan maka akan secara otomatis akan dibalas oleh siTasya sesuai informasi yang diinginkan.

3. APLIKASI PANGSID (PANGGILAN SIDANG AUDIO)



Aplikasi ini merupakan audio pemanggil untuk memanggil Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak dalam perkara perdata dan pidana untuk memasuki ruang sidang yang ditentukan.

4. E-BROSUR (BARCODE LAYANAN)



E-Brosur merupakan Brosur berbasis eletronik yang berisi informasi layanan Pengadilan Negeri Kisaran sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui jenis-jenis layanan Pengadilan Negeri kisaran hanya dengan cara scan bar-code yang dimuat di web site dan ruang PTSP.

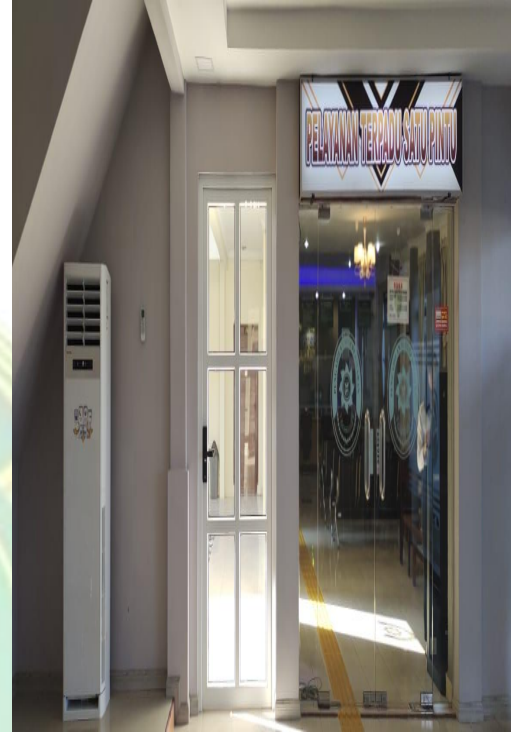
5. MESIN ANTRIAN PTSP



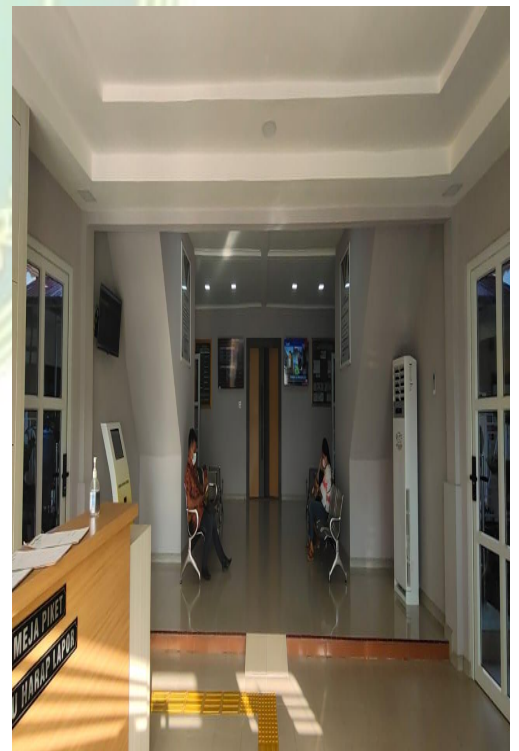
Mesin antrian bagi pengguna layanan di PTSP PN Kisaran sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan



INOVASI SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN NEGERI KISARAN



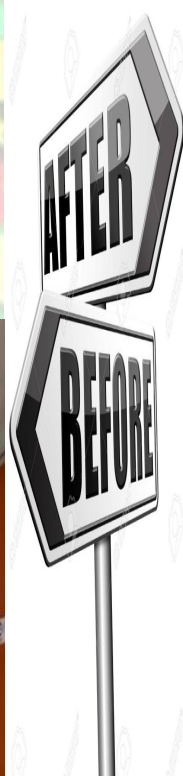
AREA STERIL / ACCESS CARD DOOR



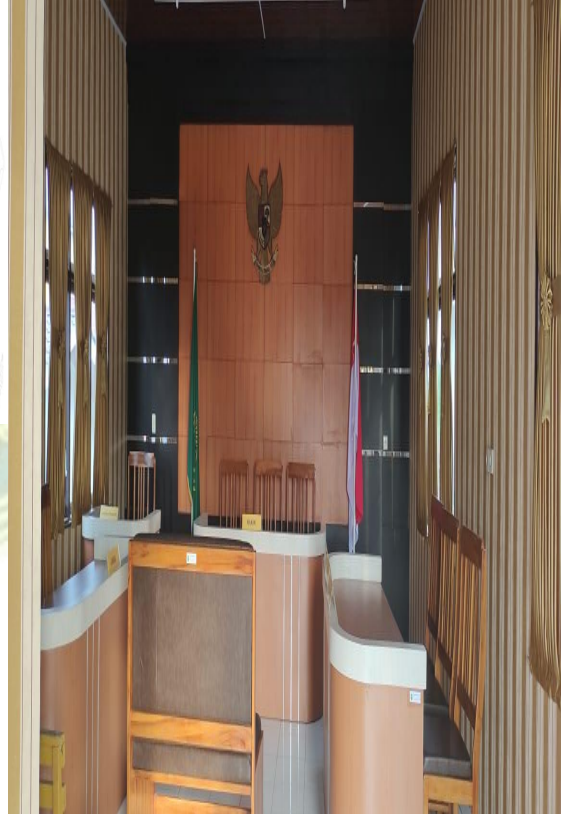
RUANG TUNGGU

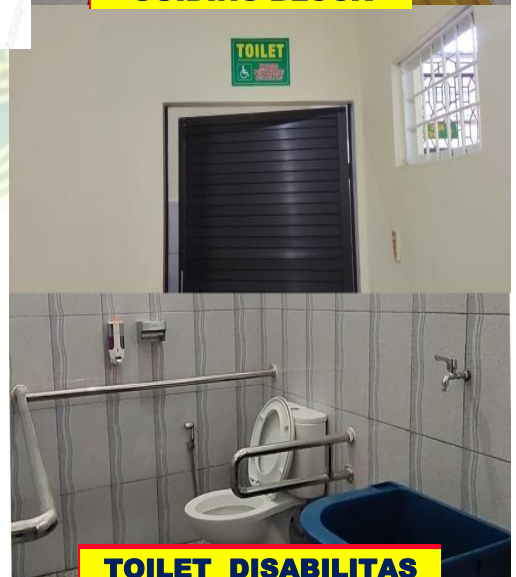
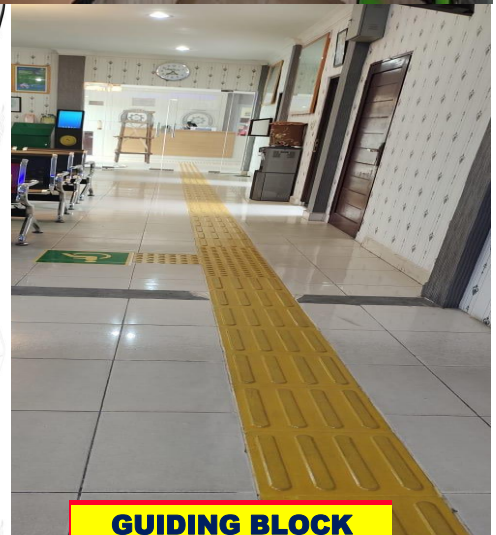
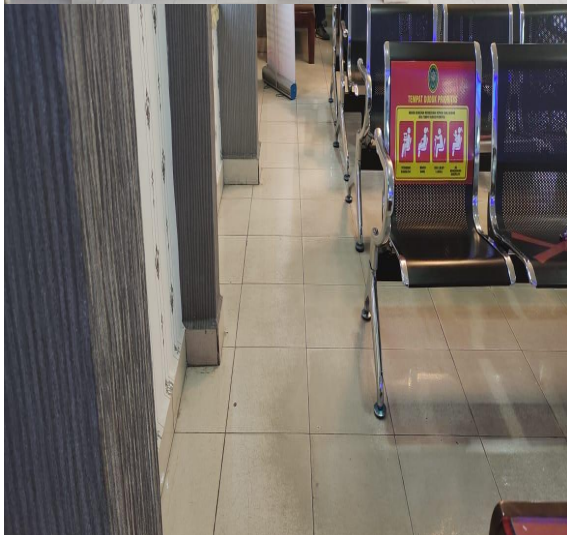


JALUR PENGUNJUNG / PAGAR PEMBATAS



GEDUNG SIDANG ANAK





SARANA DISABILITAS

KARTU PRIORITAS



KURSI RODA, TONGKAT PUTIH



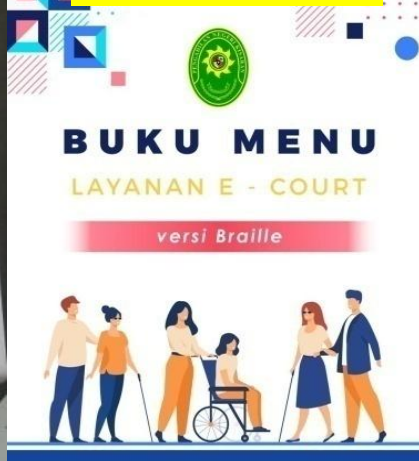
ALAT BANTU DENGAR



ALAT BANTU DENGAR



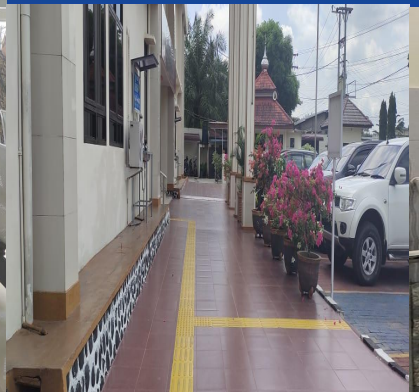
BROSUR BRAILLE



DROP ZONE



TEMPAT DUDUK PRIORITAS



GUIDING BLOK



TOILET DISABILITAS



PARKIR DISABILITAS

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS I B DI TAHUN 2023

Pertemuan 3 (Tiga) Bulanan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan di Padang Sidempuan, Sumatera Utara.

- 1. Peringkat Pertama Kategori Evaluasi Kinerja dan Penjaminan Mutu Pelayanan dan Peradilan Tahun 2023 oleh Pengadilan Tinggi Medan.*
- 2. Peringkat Pertama Kategori Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Periode 30 April 2023 oleh Pengadilan Tinggi Medan.*
- 3. Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Peserta Pertandingan berhasil mendapatkan, yaitu :*
 - Peringkat 1 Lomba Tenis Putra oleh Bapak Buyung Hardi,S.H*
 - Peringkat 3 Lomba Tenis Putri oleh Ibu Mediana Br. Tarigan,S.E*
 - Peringkat 3 Lomba Tenis Putra oleh Bapak Subakti,S.H*



4. *Dharmayukti Karini Cab. Kisaran mendapat kejuaraan dalam lomba Dharmayukti Karini Sumatera Utara yaitu : **Peringkat 3 Lomba Cerdas Cermat dharmayukti karini oleh Ribka Br. Ginting,S.H***
5. *Dharmayukti Karini Cab. Kisaran mendapat kejuaraan dalam lomba Dharmayukti Karini Sumatera Utara yaitu : **Peringkat Harapan 2 Lomba Fashion Show dharmayukti karini oleh Hana Serbina Sembiring,S.H***





6. Dalam Rangka Ulang Tahun Hut (Mahkamah Agung) Republik Indonesia ke 78 tahun 2023. Mahkamah Agung memberikakan penghargaan terbaik kepada Pengadilan Negeri Kisaran dengan Kategori :

peringkat satu - kategori pelaksanaan gugatan sederhana

peringkat satu - kategori pelaksanaan eksekusi

peringkat dua - kategori pelaksanaan mediasi

DALAM RANGKA ULANG TAHUN HUT (MAHKAMAH AGUNG) REPUBLIK INDONESIA KE 78 TAHUN 2023. MAHKAMAH AGUNG MEMBERIKAKAN PENGHARGAAN TERBAIK KEPADA PENGADILAN NEGERI KISARAN DENGAN KATEGORI :

- PERINGKAT SATU - KATEGORI PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA**

Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001 -2000

Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Negeri Kisaran	52,66
2	Pengadilan Negeri Hangil	51,78
3	Pengadilan Negeri Surakarta	45,97

- PERINGKAT SATU - KATEGORI PELAKSANAAN EKSEKUSI**

Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001 -2000

Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Negeri Kisaran	52,66
2	Pengadilan Negeri Hangil	51,78
3	Pengadilan Negeri Surakarta	45,97

DALAM RANGKA ULANG TAHUN HUT (MAHKAMAH AGUNG) REPUBLIK INDONESIA KE 78 TAHUN 2023. MAHKAMAH AGUNG MEMBERIKAKAN PENGHARGAAN TERBAIK KEPADA PENGADILAN NEGERI KISARAN DENGAN KATEGORI :

- PERINGKAT DUA - KATEGORI PELAKSANAAN MEDIASI**

Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001 -2000

Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Negeri Jombang	36,18
2	Pengadilan Negeri Kisaran	33,27
3	Pengadilan Negeri Manado	30,80



7. *Pertemuan 3 (Tiga) Bulanan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan di Medan, Sumatera Utara.*
 - Juara 2 Volly Ball Putra
 - Juara 3 Volly Ball Putri
 - Peringkat 1 Pelaksanaan Gugatan Sederhana
 - Peringkat 1 Pelaksanaan Eksekusi
 - Peringkat 2 pelaksanaan mediasi
 - Lomba 1 juara pantun

Malam Anugerah Pengadilan Tinggi Medan
PERINGKAT 1
PELAKSANAAN GUGATAN
SEDERHANA

bangga
Melayani BerAKHLAK
berprestasi

Kesatuan Untuk Mewujudkan
Peradilan yang Agung

Rangkaian Pertemuan 3 Bulanan Pengadilan Tinggi Medan
Dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan tema
"Merajut Persatuan dan Kesatuan untuk Mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung"

SABTU,
2 SEPTEMBER
2023

[pn-kisaran.go.id](https://www.instagram.com/pn-kisaran)

Malam Anugerah Pengadilan Tinggi Medan
**PERINGKAT 1
PELAKSANAAN EKSEKUSI**



Rangkaian Pertemuan 3 Bulanan Pengadilan Tinggi Medan

SABTU,
2 SEPTEMBER
2023

Dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan tema
" Merajut Persatuan dan Kesatuan untuk Mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung

pn-kisaran.go.id

Malam Anugerah Pengadilan Tinggi Medan
**PERINGKAT 2
PELAKSANAAN MEDIASI**



Rangkaian Pertemuan 3 Bulanan Pengadilan Tinggi Medan

SABTU,
2 SEPTEMBER
2023

Dengan Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan tema
" Merajut Persatuan dan Kesatuan untuk Mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung

pn-kisaran.go.id



Pengadilan Negeri Kisaran meraih beberapa kategori yaitu :

- 1. Peringkat Tiga Kinerja Pelaksanaan APBN Satker Mitra KPPN Tanjung Balai dengan Pagu Kelolaan sedang Periode Semester 1 TA 2023*
- 2. Peringkat Dua Bendahara Teladan Satker Mitra KPPN Tanjung Balai oleh Ibu Apriyanti Mandasari Siahaan (Bendahara PN Kisaran)*
- 3. Peringkat Dua Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Satker Mitra KPPN Tanjung Balai oleh Ibu Sekretaris PN Kisaran Ibu Mediana Br. Tarigan.*
- 4. Peringkat Satu Kinerja Pelaksanaan APBN Satker Mitra KPPN Tanjung Balai dengan Pagu Kelolaan sangat kecil*
- 5. Peringkat Satu Kinerja Pelaksanaan APBN Satker Mitra KPPN Tanjung Balai dengan Pagu Kelolaan Sedang*

